

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pembangunan

Menurut (Irawan dan Suparmoko, 1992) Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tingkat wujud kesejahteraan penduduk yang tinggi disuatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk khususnya pada negara yang sedang berkembang.

Dalam buku BAPPENAS, arah pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat indonesia agar semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera berdasarkan pancasila. Adapun arah kebijakan pembangunan di berbagai bidang antara lain (Mustopadidjaja, 2012):

- a. *Pembangunan Ekonomi.* Pembangunan ekonomi diarahkan mampu untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata.

- b. *Pembangunan Sumber Daya Manusia.* Pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yakni mencakup, pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan fisik atau kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan, pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan beragama, pembinaan peranan wanita dikembangkan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya.
- c. *Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.* Air, tanah dan lahan yang mempunyai nilai ekonomi dan fungsi sosial, pemanfaatan yang perlu diatur dan dikembangkan dan terkoordinasi bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat melalui berbagai penggunaan.
- d. *Pembangunan Daerah.* Pembangunan daerah diarahkan mampu untuk memacu pemerataan pembangunan serta hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran serta aktif masyarakat dan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Adapun komponen spesifik atas “kehidupan yang serba lebih baik” itu, bertolak dari tiga nilai pokok yakni, kecukupan, jati diri serta kebebasan. Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan utama (Todaro, 1999) yaitu:

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materi melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara atau bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2. Pengertian Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan manusia secara terukur dan *representative*. Pembangunan manusia menjadi salah satu yang diperhatikan berbagai banyak pihak dalam upaya perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap penting dan berharga (Patak, 2014).

Dalam laporan Pembangunan Manusia tahun 2001, UNDP (*United National Development Program*) menyatakan empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan manusia, yaitu:

- a. Peningkatan produktivitas dan partisipasi penuh dalam lapangan pekerjaan dan perolehan pendapatan.
- b. Peningkatan akses dan kesetaraan untuk memperoleh peluang-peluang ekonomi dan politik. Dengan kata lain, penghapusan segala bentuk hambatan ekonomi dan politik yang menghalangi setiap individu untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari peluang-peluang tersebut.
- c. Aspek berkelanjutan, yakni peluang-peluang yang disediakan kepada setiap individu pada saat ini dapat dipastikan tersedia untuk generasi yang akan datang, terutama daya dukung lingkungan atau modal alam dan ruang kebebasan manusia untuk terus berkreasi.
- d. Pembangunan tidak hanya serta-merta untuk masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat. Artinya, masyarakat harus terlibat penuh dalam setiap proses-proses pembangunan bukan hanya sekedar obyek pembangunan tetapi adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah indikator untuk mengukur kualitas perkembangan manusia dari hasil pembangunan ekonomi. Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* yang kemudian berlanjut setiap

tahun. Unsur – unsur yang terpenting dalam laporan-laporan tersebut, yang mulai terbit sejak tahun 1990 adalah konstruksi dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia. Seperti halnya PQLI, PQLI merupakan indeks komposit atau gabungan dari tiga indikator, yaitu: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. HDI mencoba meranking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkat pembangunan manusia yang tertunda) hingga 1 (pembangunan manusia yang tinggi) berdasarkan atas tiga tujuan pembangunan (Kuncoro, 1997) yaitu:

- a. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing dan asumsi menurunnya utilitas margin penghasilan dengan cepat.

Kendati *Human Development Index* (HDI) memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan (Todaro, 1995) memberi catatan yaitu:

1. Pembentukan HDI sebagian didorong oleh strategi politik yang didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan, kesehatan dan pendidikan.

2. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal (misalnya, tim PBB ingin menggunakan status nutrisi bagi anak berusia dibawah lima tahun sebagai indikator kesehatan yang ideal, tetapi datanya tidak tersedia).
3. Nilai HDI suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut.
4. Alternatif pendekatan yang memandang ranking GNP perkapita dan kemudian melengkapinya dengan indikator sosial yang masih di hargai.
5. Harus selalu ingat bahwa indeks merupakan indikator pembangunan yang relatif bukan absolut.

4. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan salah satu keberhasilan di suatu wilayah dalam pembangunan meskipun hanya merangkum beberapa indikator pembangunan. Secara operasional ada tiga komponen ukuran Indeks Pembangunan Manusia yang merefleksikan pembangunan manusia yaitu (Patak, 2014):

e. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada prioritas daya beli.

f. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan penduduk disuatu wilayah dapat menikmatinya. Indeks harapan hidup diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan hidup ketika lahir dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

g. Indeks Pendidikan

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah Pendidikan. Indeks Pendidikan diukur berdasarkan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas karena mayoritas penduduk dengan umur tersebut sudah ada yang berhenti sekolah.

5. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Substansi kemiskinan adalah kondisi deprevasi terhadap sumber untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar, namun kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional karena pada kenyataannya kemiskinan juga berkaitan dengan persoalan non-ekonomi seperti, sosial, budaya, dan politik (Rais, 1995).

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah

masalah yang kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan (Mirza, 2012).

Pada tahun 1973, WHO/FAO merekomendasi tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1.900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Berdasarkan ukuran tersebut, Sajogya telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut (Suyanto, 2013):

- 1) Untuk daerah perkotaan, seseorang dikatakan miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya.
- 2) Untuk daerah pedesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 180 kilogram per tahunnya.

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka yang terjebak ke dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan atau penghasilan. Apabila pengangguran disuatu negara buruk serta kekacauan politik dan sosial selalu menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar pemasukan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika

masalah pengangguran terjadi pada masyarakat berpendapatan rendah terutama yang berada di atas garis kemiskinan maka insiden pengangguran dengan mudah menggeser mereka pada posisi kemiskinan.

b. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Potensi ekonomi erat kaitannya dengan lapangan usaha unggulan. Lapangan usaha unggulan atau yang mempunyai peranan besar dalam perekonomian menjadi prioritas untuk lebih dikembangkan. Selain akan lebih cepat dalam memacu perkembangan perekonomian, efek dominonya akan dapat mendorong perkembangan lapangan usaha lainnya. Selain potensi ekonomi tentunya juga perlu diperhatikan seberapa jauh perkembangan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah mengoptimalkan kapasitas ekonomi yang dapat menciptakan nilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan perekonomian maupun dijadikan ukuran dalam kemakmuran secara makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Somodiningrat, PDRB dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Pada metode produksi, PDRB diperoleh dengan menjumlahkan nilai produksi suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi di suatu daerah tertentu, yang biasanya dalam satu tahun. Pada metode pendapatan, PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor-faktor produksi yang ikut andil dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan pada metode pengeluaran, PDRB diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, penambahan stok ekspor neto dalam wilayah tertentu dan pembentukan modal domestik bruto. Diantara ketiga pendekatan tersebut, yang paling banyak digunakan dan di terapkan di berbagai daerah Kabupaten/Kota adalah pendekatan produksi (Tjandra, 2010).

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat setempat. Dengan meningkatnya produktivitas, maka penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tingginya PDRB akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan IPM, karena daya beli merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan (Todaro, 2006).

c. Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Mirza, 2012) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan memberi arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur dan kebutuhan masyarakat umum yang sering disebut juga belanja pembangunan yang berupa pembangunan investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan penambahan aset daerah. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang yang dipergunakan untuk investasi dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya (Bastian, 2005).

Belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintahannya. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja. Pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan karakteristik bangsa. sehingga pendidikan merupakan landasan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung tetapi juga mempunyai hubungan positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah. (Suwandi, 2015).

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun skripsi ini. Secara terperinci penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1.	Nur Baeti, 2013, Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa tengah Tahun 2007-2011	Data Panel: Model Poolep Lest (<i>Common Effect</i>) Model Pendekatan Tetap (<i>Fixed Effect</i>)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengangguran▪ Pertumbuhan Ekonomi▪ Pengeluaran Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien negatif sebesar 1,96 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2007-2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengangguran mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 1,96.2. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
				<p>peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,14.</p> <p>3. Berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah yang dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif sebesar 4,60. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 4,60.</p>
2.	Prima Sukmaraga, 2011, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin	Analisis regresi Linear berganda dengan metode OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Pembangunan Manusia ▪ PDRB per kapita ▪ Jumlah Pengangguran 	1. Hasil regresi persamaan slope koefisien dari Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan angka -9.142907931 yang berarti bahwa kenaikan 1% Indeks Pembangunan Manusia akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 9.142907931%. Pada persamaan tersebut Indeks Pembangunan Manusia hubungannya negatif dan signifikan pada alpha 5%.

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
				<p>2. Hasil regresi persamaan menunjukkan sloope koefisien dari PDRB per kapita menunjukan angka -0.3635990536 yang berarti bahwa kenaikan 1% angka PDRB per kapita akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar -0.3635990536%. Pada persamaan tersebut PDRB perkapita hubungannya negatif dan signifikan pada alpha 5%.</p> <p>3. Hasil regresi persamaan menunjukkan sloope koefisien dari <i>Unemployment/</i> Jumlah Pengangguran (U) menunjukkan angka 0.8834590113 yang berarti bahwa kenaikan 1% angka Jumlah Penagngguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.8834590113%. pada persamaan tersebut <i>Unemployment/</i> Jumlah pengangguran (U) hubungannya positif dan signifikan pada alpha 5%</p>
3.	Denni Sulistio Mirza, 2012, Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap	Data panel: Gabungan <i>time series</i> dan <i>cross section</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemiskinan ▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ Belanja modal 	1. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas negatif sebesar 0,208192 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009.

No	Penulis, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
	Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009			<p>Hal ini menunjukkan apabila rasio kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan manusia di Jawa Tengah sebesar 0,153.</p> <p>3. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio belanja modal yang dikeluarkan mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,274.</p>

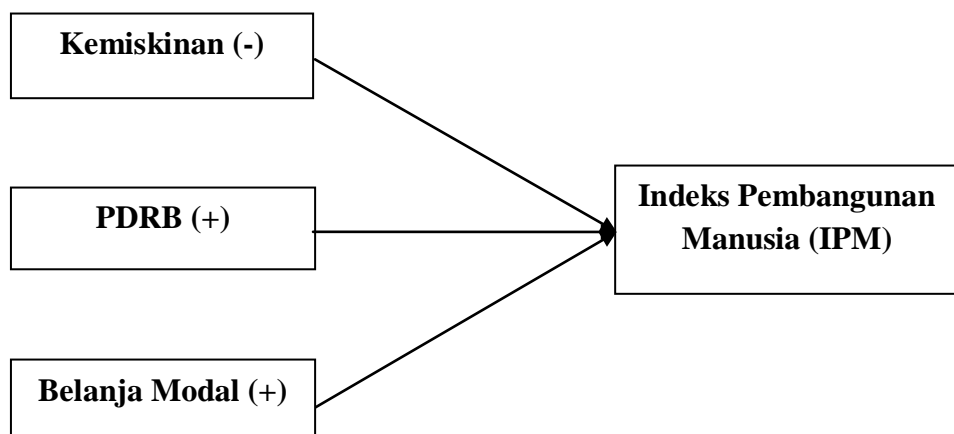
No	Nama, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
4.	Nadia Ayu Bhakti, 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012	Data Panel: Model Poolep Least (<i>common Effect</i>) Model Pendekatn Efek Tetap (<i>Fixed Effect</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ▪ Rasio ketergantungan ▪ Konsumsi rumah tangga ▪ APDB untuk pendidikan ▪ APBD untuk kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PDRB di 33 provinsi di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan koefisien sebesar 0,86. Berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1% maka dapat menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,86%. 2. Rasio ketergantungan di 33 provinsi di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan koefisien sebesar -0,33 berartibahwa setiap peningkatan rasio ketergantungan sebesar 1% , maka dapat menyebabkan penurunan IPM sebesar 0,33% dengan asumsi variabel lain tetap. 3. Konsumsi rumah tangga untuk 33 provinsi di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan koefisien sebesar -0,10 berarti bahwa setiap peningkatan konsumsi rumah tangga untuk makanan sebesar 1% , maka dapat menyebabkan penurunan IPM sebesar 0,10% dengan asumsi variabel lain tetap (<i>ceteris paribus</i>).

No	Nama, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
				<p>4. APBD untuk pendidikan di 33 provinsi di Indonesia dengan alpha 0,5 H_0 tidak dapat ditolak, tapi pada alpha 0,1 H_0 ditolak.</p> <p>5. APBD untuk kesehatan di 33 provinsi di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan koefisien sebesar 0,37% berarti bahwa setiap peningkatan APBD untuk kesehatan sebesar 1%, maka dapat menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,37% dengan asumsi variabel lain tetap (<i>ceteris paribus</i>).</p>
5.	Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, 2013, Indeks Pembangunan manusia	<i>Error Correction Model</i> (ECM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ▪ Pajak Pendapatan (PPN) ▪ Dummy Desentralisasi (DD) ▪ Dummy Krisis Ekonomi (DK) 	<p>1. Hasil pengujian model ECM menunjukkan bahwa RESI (<i>error correction term</i>) terlihat signifikan meskipun pada tingkat 10% saja. PDB dan PPN mempengaruhi IPM dalam jangka pendek (selain juga pengaruh jangka panjang terlihat juga bahwa DD dan DKI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.</p> <p>2. Tentang pengaruh DD terhadap IPM, hal ini membenarkan keraguan sebagai ahli ekonomi bahwa diperlukan waktu panjang sebelum Pemerintah Daerah mampu menggunakan</p>

No	Nama, tahun dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
				dengan efisien dan efektif statusnya sebagai daerah otonom (Brojonegoro, 2007). Krisis tahun 1997 tampak tidak berpengaruh terhadap IPM sementara krisis tahun 2008 secara signifikan berpengaruh terhadap IPM.
6.	Riva Ubar Harahap, 2011, Pengaruh dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara	Metode Purposive sampling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana alokasi umum ▪ Dana alokasi khusus ▪ Dana bagi hasil 	<p>1. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel independen DAU, DAK dan DBH serta variabel dependen IPM disimpulkan bahwa DAU dan DBH berpengaruh secara positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap IPM. Artinya kenaikan DAU dan DBH akan menyebabkan kenaikan IPM. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh secara negatif dan signifikan pada alpha 5% terhadap IPM, artinya kenaikan DAK akan menurunkan IPM. Model yang terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut: $Y = 72.005 + 4.306 X_1 - 4.304 X_2 + 6.345X_3 + e$.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Pada pembahasan ini, penulis memaparkan model/kerangka pikir penelitian yang menjadi alur berfikir dalam melihat pengaruh variabel yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui kerangka pikir penelitian Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema kerangka pemikiran

Data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu dan data silang. Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu: *pertama*, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. *Kedua*, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilang variabel (omitted-variabel).

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, mulai dari latar belakang hingga penjelasan teori, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Diduga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Diduga Belanja Modal berpengaruh positif terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.